

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMBERIAN DANA GUNA PEMBIAYAAN MUDHAROBAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh**

**PUTRI PELANGI  
NPM. 1551020256**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMBERIAN DANA GUNA PEMBIAYAAN MUDHAROBAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**Pembimbing I : Prof.Dr.H.Suharto,S.H.,M.A**  
**Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwul Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama (KSPPS BTM BiMU) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan berbasis syariah yang ada di Indonesia yang melakukan pelaksana jasa keuangan. Salah satu pembiayaannya dikenal dengan nama Pembiayaan Mudharabah. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan serta agar kegiatan pembiayaan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka koperasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Pemberian Dana pada Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dalhan Way Kandis Bandar Lampung?, Bagaimanakah Implementasi SPI di KSPPS BTM BiMU dalam perspektif ekonomi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi SPI dalam pemberian dana pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung, serta untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi SPI dalam pemberian dana pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah KSPPS BTM BiMU. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS BTM BiMU dalam melaksanakan proses transaksi pembiayaan telah sesuai dengan peraturan, kebijakan perusahaan, dan telah sesuai dengan unsur dan prinsip sistem pengendalian internal yang layak dan memadai serta sesuai dengan prinsip syariah dan pengendalian dalam pandangan Islam. Meskipun demikian dalam penelitian ini terdapat beberapa prinsip dari komponen sistem pengendalian internal yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan hanya sebagai kantor cabang, sedangkan yang memiliki wewenang tersebut ialah kantor pusat (*head office*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan unsur serta prinsip pengendalian internal COSO dan pengendalian dalam perspektif ekonomi Islam telah diterapkan dengan baik di KSPPS BTM BiMU.

**Kata Kunci :** Pembiayaan, Standar COSO dan SPI.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL PEMBERIAN DANA GUNA PEMBIAYAAN  
MUDHAROBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus pada KSPPS BTM BiMU Cabang  
Ahmad Dahlan Bandar Lampung)**

**Nama : Putri Pelangi**

**NPM : 1551020256**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.**  
**NIP. 19530423 198003 1 003**

**Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.**  
**NIP. -**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
**NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI SISTEM - PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN DANA GUNA PEMBIAYAAN MUDHAROBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Bandar Lampung)"** disusun oleh Putri Pelangi, NPM: 1551020256, Jurusan: Perbankan Syariah telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 19 Desember 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang : Dr. Rubhan Masykur, M. Pd**

**Sekretaris : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.**

**Penguji I : Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji II : Prof.Dr.H. Suharto, S.H.,M.A**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Rubhan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 198008012003121001**



## MOTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ  
فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*<sup>1</sup> (Q.S Al-Imran : 103)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Depag RI, 2005), h. 52.

## PERSEMBAHAN

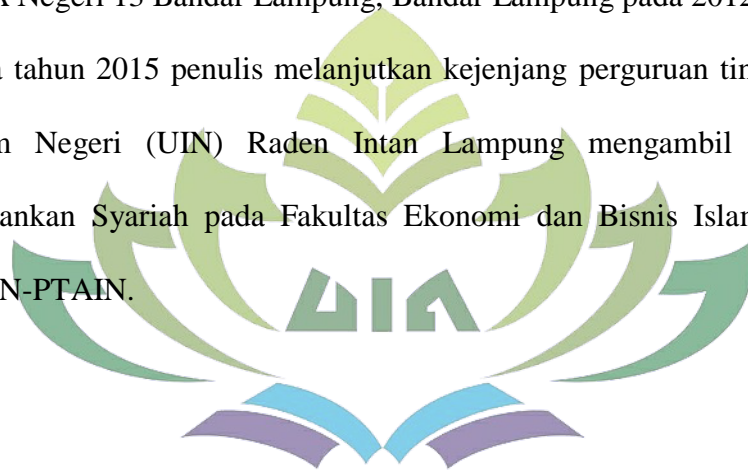
Sujud syukur kupersembahkan kepada ALLAH yang mahakuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang tersayang:

1. Orang tuaku Bapak Endang Sukanto (Alm) tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terimakasih untuk Bapak.
2. Kakakku Ghines Susanti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Teman sekaligus sahabat Meli Safitri, S.Pd dan Bripda Cindy Cintya Dewi. Terimakasih teman, sahabat dan kakak.
4. Serta skripsi ini kupersembahkan untuk almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Alhadulillah penulis dianugerahi nama Putri Pelangi. Dilahirkan di Bandar Lampung, tepatnya di Kotabumi pada tanggal 5 April 1997. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara atas pasangan Bapak Endang Sukanto dan Ibu Erma Wati. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut.

1. SD N 1 Way Kandis, Bandar Lampung pada tahun 2003-2009
2. SMP Negeri 19 Bandar Lampung, Bandar Lampung pada 2009-2012
3. SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Bandar Lampung pada 2012-2015
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur SPAN-PTAIN.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya, yang karena-Nya, penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengendalian Internah Guna Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan)”.’.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata I Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lewat penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan serta kesulitan, namun karena binaan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hambatan tersebut dapat teratasi. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A. selaku Pembimbing 1 yang selalu memberikan perhatian, bimbingan, nasehat, dan masukan yang berarti selama penulisan skripsi ini
4. Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama bangku perkuliahan.
6. Kepada KSPPS BTM BiMU beserta pegawai yang memberikan izin dan membantu penulis guna menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam (UIN) Raden Intan Lampung.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materil penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal jariah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak yang membacanya. Aamiin

Bandar Lampung, 19 Desember 2019  
Penulis,

**Putri Pelangi**  
**1551020256**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	19
 <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>23</b>
A. Sistem Pengendalian Internal dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengendalian Internal dalam Ekonomi Islam .....	23
2. Komponen Sistem Pengendalian Internal dalam Ekonomi Islam.....	25
3. Pilar Etika Manajemen Bisnis Islam .....	28
4. Norma-Norma Etika dalam Berusaha dan Bekerja.....	29
B. Sistem Pengendalian Internal.....	31
1. Definisi Sistem Pengendalian Internal .....	31
2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	33
3. Komponen Sistem Pengendalian Internal .....	34
4. Fungsi Penting Pengendalian Internal.....	39
C. Lembaga Pembiayaan Syariah.....	40
1. Pengertian Pembiayaan .....	40
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	41
3. Tujuan Pembiayaan .....	42
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	44
5. Pengertian Pembiayaan Konsumen Syariah.....	46
6. Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen .....	47
7. Prinsip Operasional Pembiayaan Konsumen Syariah .....	49

8. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen dengan Akad <i>Mudharabah</i> .....	49
9. Dasar Hukum Mudharabah .....	52
10. Prosedur Pembiayaan Konsumen Syariah .....	54
D. Kerangka Pikir .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BTM BiMU .....	57
1. Profil KSPPS BTM BiMU .....	57
2. Visi dan Misi BTM BiMU .....	58
3. Logo dan Makna BTM BiMU .....	59
4. Motto BTM BiMU .....	61
5. Kelembagaan BTM BiMU Berdiri Dengan Badan Hukum Koperasi .....	61
6. Kantor Cabang BTM BiMU .....	62
7. Struktur Organisasi BTM BiMU .....	64
8. Jenis Produk-produk dan Akad-Akadnya .....	65
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah .....	71
1. Pengajuan/Permohonan Pembiayaan .....	71
2. Pemeriksaan .....	72
3. Persetujuan Pemberian Pembiayaan .....	72
C. Pencairan Dana Pembiayaan .....	72
D. Pelunasan Pembiayaan .....	73
E. Implementasi Sistem Pengendalian Internal pada KSPPS BTM BiMU .....	75
F. Instrumen Sistem Pengendalian Internal pada KSPPS BTM BiMU .....	76
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>7</b>
A. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Dana Guna Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Bandar Lampung .....	81
B. Implementasi Pengendalian Internal Pemberian Dana Guna Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Bandar Lampung .....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Pada kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan serta terkait dengan tujuan skripsi ini. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun uraian dari pengertian istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Implementasi**

Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

#### **2. Sistem**

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsi (dengan satuan fungsi atau tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau kegiatan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nurdin Umar, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), h. 70.

<sup>2</sup>Hanif, *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada PK-BLU Studi Kasus Di IAIN Raden Intan Lampung* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 11.

### 3. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.<sup>3</sup>

### 4. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>4</sup>

#### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Objektif

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi KSPPS BTM BiMU khususnya mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian dana guna pembiayaan mudharabah.
- b. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan terutama mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian atau penyaluran dana pada suatu pembiayaan dalam sebuah perusahaan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> Rizal Yaya dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontenporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 115.



## 2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dan Pembiayaan dalam Islam.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan ataupun sumber lainnya yang mendukung seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan serta kesediaannya KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan untuk dijadikan tempat penelitian.

## C. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Al-Qur'an juga satu satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, al-Qur'an juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya telah Allah tuliskan dalam al-Qur'an tak terkecuali dengan memenejem suatu pekerjaan.

Islam mewajibkan manusia untuk mengatur segala urusan yang akan dikerjakannya serta berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja

yang bekerja keras.<sup>5</sup> perintah Allah kepada manusia untuk memenejemen dan bekerja. Seperti sabda Nabi SAW yang artinya : *“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukannya dengan itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas).* (HR. Thabrani). Lebih sederhananya lagi Allah berfirman dalam Q.S Al-Imran ayat 103 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”* (Q.S Al-Imran: 103)

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 169.

sebagainya. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya, adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya.

Apula yang meminjam dari rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peraninstitusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.<sup>6</sup>

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.<sup>7</sup>

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.<sup>8</sup> Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah:

1. Sewa guna usaha (*leasing*);
2. Anjak piutang (*factoring*);
3. Usaha kartu kredit (*credit card*);

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 169.

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009),h. 333.

<sup>8</sup>Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan Pembiayaan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.



#### 4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

Secara umum perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh *revenue* yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan.

Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan system konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Belakangan perusahaan pembiayaan juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya pasar keuangan. Menurut data DSN MUI pada tahun 2008 terdapat 11 perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia, yaitu PT Federal International Finance, PT Semesta Citra Dana, PT Mandala Multifinance, Tbk., PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk., PT Amanah Finance, PT Fortuna Multi Finance, PT. Trust Finance Indonesia, Tbk., PT Capitalinc Finance, PT Al-Ijarah Indonesia Finance, PT Trimamas Finance, PT Nusa Surya Ciptadana.<sup>10</sup>

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat

---

<sup>9</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*, h. 335.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 348.

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.<sup>11</sup>

Kualitas pembiayaan yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelolaan yang baik oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, yang mencakup, antara lain tentang tujuan dan proses pembiayaan, prinsip-prinsip organisasi pembiayaan, kebijakan dan prosedur pembiayaan, perencanaan dan strategi pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan pembiayaan, serta pengawasan pembiayaan.<sup>12</sup>

Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan berbagai sebab yang berpotensi terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit atau pembiayaan yang disalurkan bermasalah.<sup>13</sup>

Terhitung 1 Januari 2016, industri lembaga pembiayaan Indonesia telah memasuki babak baru dalam penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan, karena industri lembaga pembiayaan harus mengelola risiko yang harus dihadapinya sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang penetapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Otoritas Jasa keuangan telah mewajibkan

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 160-.161.

<sup>12</sup>IBI (Ikatan Bankir Indonesia), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 3.

<sup>13</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet.11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 105-106.

seluruh perusahaan lembaga pembiayaan di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif mulai 1 Januari 2016.<sup>14</sup>

Terdapatnya Unsur risiko dalam pembiayaan menyebabkan diperlukannya suatu pengamanan pembiayaan, tujuan pengamatan ini adalah untuk memperkecil resiko yang dapat timbul. Sehingga pihak lembaga pembiayaan perlu berusaha meningkatkan kualitas pengamanan dalam setiap proses sistem pemberian pembiayaan yang diberikan agar dapat memperkecil peluang terjadinya pembiayaan macet.<sup>15</sup>

Upaya untuk mengurangi risiko yang akan timbul yaitu salah satunya dengan cara menerapkan manajemen risiko lembaga pembiayaan dimana salah satunya yaitu mencakup Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem Pengendalian internal yang baik sebagai acuan agar kegiatan operasional lembaga pembiayaan dan manajemen dapat berjalan dengan baik pula.

Berdasarkan undang-undang Sarbanes-Oxley, manajemen dari semua perusahaan publik diharuskan untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal ; (a) suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan, (b)

---

<sup>14</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, dan penelitian*(Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 265.

<sup>15</sup>Mohammad Muzammil, "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal PenyaluranKredit Pada BRI Kota Samarinda (Studi Kasus Di Bri Kcp Unit Karang Paci Samarinda)".(eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 3 No.3, 2015), h. 662.

suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun buku perusahaan.<sup>16</sup>

Sistem pengendalian internal menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong diterapkannya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Dengan adanya pengendalian internal yang memadai pada perusahaan diharapkan mampu menjamin proses pemberian suatu pembiayaan akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan serta dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam lembaga keuangan tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan syariah (KSPPS) Bina Masyarakat Utama (BiMU) sebagai salah satu perusahaan pembiayaan murni syariah yang menyediakan berbagai jenis produk pembiayaan mulai dari pembiayaan modal, penambahan barang dagangan, serta tabungan fitri

Fenomena kemudahan pemberian pembiayaan pada KSPPS BTM BiMU ini sangat menarik untuk diteliti, apakah KSPPS BTM BiMU telah melaksanakan prinsip kehati-hatian memberikan pembiayaan khususnya pemberian Dana pada Pembiayaan mudhorabah yang sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal dan kebijakan prosedur pemberian pembiayaan yang

---

<sup>16</sup>Hery, *Auditing and Asurances Integrated and Comprehensive Edition* (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), h. 133.

<sup>17</sup>Hanif, *Op.Cit.*, h. 12.



diterapkan dan berlaku di KSPPS BTM BiMU cabang Ahmad Dahlan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN DANA GUNA PEMBIAYAAN MUDHAROBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan)".

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Instrumen Sistem Pengendalian Internal di KSPPS BTM BiMU dalam Pembiayaan Mudharabah ?
2. Bagaimanakah Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Dana pada Pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung ?
3. Bagaimanakah Implementasi Sistem Pengendalian Internal di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Instrumen Sistem Pengendalian Internal di KSPPS BTM BiMU dalam Pembiayaan Mudharabah.
2. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal dalam pemberian dana pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Simpan

Pinjam & Pembiayaan Syariah Bina Masyarakat Utama (KSPPS BTM BiMU) Cabang Ahmad Dahlan.

3. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal di Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bina Masyarakat Utama (KSPPS BTM BiMU) Cabang Ahmad Dahlan dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis (keilmuan) hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana implementasi sistem pengendalian internal dalam pemberian dana pada pembiayaan mudharabah di koperasi simpan pinjam & pembiayaan syariah bina masyarakat utama (KSPPS BTM BiMU) cabang ahmad dahlan dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Perbankan Syariah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan mengenai bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Dana Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan dalam perspektif ekonomi Islam sehingga menjadi sumber referensi agar para pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil dari penelitian

ini sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

## G. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinnya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.<sup>18</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian naturalistik yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, karena penelitian nya dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

---

<sup>18</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), h. 10-11.

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>19</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung.

Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai sistem pengendalian internal dalam pemberian dana pada pembiayaan.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*).<sup>22</sup> Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 8-9.

<sup>20</sup> Moh Prabu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10.15.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h.48.

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h., 80.



pemberian dana pada pembiayaan mudharababah di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku.

## 2. Tempat

Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Cabang Ahmad Dahlan jl. Ratu Dibalau, Way Kandis – Bandar Lampung ( 0721-8011229 )

## 3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terkait di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan seperti pimpinan lembaga serta karyawan bagian *Financing*, *Sales (Marketing)*, HR dan *Under Writing* berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dari perpustakaan, Al-Quran,

<sup>23</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.*, h. 89.

<sup>24</sup> J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h. 8.

Hadits, buku-buku literatur, dan data sekunder dari dokumen-dokumen yang terkait dengan judul skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari KTPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan profil lembaga dan sistem pengendalian internal yang di terapkan dalam pemberian dana pada pembiayaan mudharabah.

#### 4. Bahan dan Materi Penelitian

##### a. Populasi

Didalam metodologi penelitian populasi merupakan objek penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup> Populasi merupakan semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh staf dan karyawan KTPPA BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>26</sup> Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

---

<sup>25</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 129.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 116.

tertentu.<sup>27</sup> Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu subbagian pembiayaan (*Financing, Sales/Marketing, HR dan Under Writing*) dan Pimpinan KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan (*Branch Manager*).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan.

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti mendengar dan mengamati mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Dana pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan.

### b. Interview (wawancara)

*Interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h., 218-219.

<sup>28</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.*, h. 32.

responden, dan jawaban-jawaban tersebut di catat atau direkam.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaannya penulis melakukan *interview* bebas terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait judul penelitian ini seperti pimpinan KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan. karyawan (*Financing, Sales/Marketing, HR dan Under Writing*) serta pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Penulis menggunakan metode ini guna memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Dana Pada Pembiayaan Mudharobah.

#### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini digunakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan system pengendalian internal dalam Pemberian Dana Pada Pembiayaan Mudharobah KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 137-138.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 32-33.



## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>31</sup>

### a. Analisis sebelum dilapangan

Penulis melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis yang penulis lakukan yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pengendalian pada Pembiayaan Mudharobah Di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan.

### b. Analisis sesudah dilapangan

#### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Metode analisis data melalui reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>32</sup> Dengan reduksi data, maka penulis merangkum, mengambil data yang penting dan pokok mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Dana Pada Pembiayaan Mudharobah di KSPPS BTM

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Op.Cit.*, h. 245.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 247.

BiMU Cabang Ahmad Dahlan, serta membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol Dana Pada Pembiayaan Mudharobah di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan .

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yang penulis uraikan dengan uraian singkat yang bersifat naratif agar lebih spesifik tentang Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian

## 3) *Conclusion Drawing* (Verifikasi Data)

Data mengenai penerapan sistem pengendalian internal serta pemberian dana ekspres syariah pada pembiayaan syahaja yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya dikemukakan pada tahap awal, serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat namun jika bukti sudah kuat maka kesimpulan sudah bersifat kredibel.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung. Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang sistem pengendalian internal dalam pemberian dana guna pembiayaan mudharobah. Oleh karena itu, selain

berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faradila A. Salim yang berjudul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin Manado*.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Bukopin cabang Manado melakukan proses dan teknik sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang layak dan memadai sesuai dengan teori pengendalian internal oleh COSO, maka pihak bank dapat mengatasi kredit macet dan bank tidak akan mengalami kerugian yang besar.<sup>33</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pemi Rosalina Hadi dan Yuliasuti Rahayu yang berjudul *Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan

---

<sup>33</sup>Faradila A. Salim, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin manado". (Jurnal EMBA, Vol. 3 No.1, Maret, 2015), h. 1034.

prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan tentang Pengajuan Kredit. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet.<sup>34</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Rimbawa yang berjudul *Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus pada Bank Jabar Cabang Suci Bandung)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam melakukan aktivitas pemberian kredit, Bank Jabar cabang Suci telah mampu menerapkan sistem informasi akuntansi pemberian kredit secara memadai, pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit juga telah efektif dan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pemberian kredit telah berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian.<sup>35</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Darsono berjudul “Analisis penerapan struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang

---

<sup>34</sup>Pemi Rosalina Hadi dan Yuliasuti Rahayu, “Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya”. (*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 11, 2014), h. 1.

<sup>35</sup>Dikdik Rimbawa, “*Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit*. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Ilmu Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung, 2005), h. 4.



diberikan oleh bank syariah cabang semarang”. Dewi dan Darsono menyimpulkan bahwa Pembiayaan yang mengalami pengembalian macet mencapai tiga persen selama periode tahun 2011. Tidak disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan, melainkan karena faktor lingkungan dan keadaan nasabah.<sup>36</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Wisadha yang berjudul “Analisis efektifitas struktur pengendalian internal atas prosedur kredit pada bank pengkreditan rakyat di kabupaten badung”. Setiawan dan Wisadha mengatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian efektifitas struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit dalam upayamenekankan terjadinya kredit macet pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di kabupaten badung sudah berjalan dengan sangat efektif.<sup>37</sup>

Dari sekian penelitian diatas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih mengenai implementasi sistem pengendalian internal pemberian dana guna pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi islam, dimana studi dilakukan pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Bandar Lampung.

---

<sup>36</sup> Dewi, N.M.S., dan Darsono. (2012). Analisis penerapan struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang diberikan oleh bank syariah cabang semarang. *Jurnal akuntansi Dipenegoro*, Vol. 1. No. 1, hal. 1-15.

<sup>37</sup> Setiawan, N.O.H., dan Wisadha, I.G.S., (2014). Analisis efektifitas Struktur pengendalian intern atas prosedur kredit pada BPR dikabupaten badung. *Jurnal Akuntansi universitas udayana*, Vol. 6 No. 2 hal 306-318, ISSN 2302-8556.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sistem Pengendalian Internal dalam Perspektif Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengendalian Internal dalam Ekonomi Islam

Pengendalian dan pengawasan adalah dua istilah yang secara etimologi berasal dari istilah asing, yaitu *controlling*. Dalam praktik manajemen, pengendalian ada kecenderungan mengadakan tindakan korektif. Dalam pandangan islam pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi.<sup>2</sup> AL-Quran memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak ada unsur, eksploitasi, dan terbebas dari kecurigaan atau penipuan, serta keharusan membuat administrasi transaksi kredit.<sup>3</sup> Dengan demikian, pengertian pengendalian dalam

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah" (*Jurnal MIMBAR*, Vol. 29 No. 1, Juni, 2013), h. 13.

<sup>2</sup> P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). H. 17.

<sup>3</sup> Madnasir, Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 95

ekonomi Islam adalah pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak sesuai dengan cara-cara yang didasarkan pada syariah Islam.

Salah satu dasar hukum sistem pengendalian internal terdapat dalam Q.S Al-Mujaadilah ayat 7, yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ ۗ مَعَهُمْ أَيُّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS al-Mujaadilah:7)

Tafsir Q.S Al-Mujaadilah ayat 7 menurut Ibnu Katsir adalah sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ...

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang," (QS al-Mujaadilah:7)

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh potongan ayat tersebut yakni, Tiga orang yang berbisik-bisik membicarakan suatu rahasia.

...إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ  
مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ...

*“melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada.” (QS al-Mujaadilah:7)*

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh potongan ayat tersebut adalah Dia Maha Melihat kepada mereka, mendengar semua pembicaraan mereka, rahasia mereka dan bisik-bisik mereka di antara sesamanya. Dan selain dari itu para malaikat yang telah ditugaskan oleh-Nya mencatat semua yang mereka rahasiakan, walaupun Allah mengetahuinya dan mendengarnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

*“Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang ghaib.” (Q.S At-Taubah : 78)*

أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّآ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

*“Apakah mereka mengira, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (Malaikat-malaikat) kami selalu mencatat di sisi mereka.” (Q.S Az-Zukhruf : 80)*

Karena itulah maka diriwayatkan oleh sejumlah ulama yang menyatakan adanya *ijma'* (kesepakatan) sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa

makna yang dimaksud ialah kebersamaan ilmu Allah SWT., dan ini memang tidak diragukan lagi kebenarannya; tetapi pendengaran-Nya juga bersama-sama ilmu-Nya meliputi mereka, dan penglihatan-Nya menembus mereka. Maka Allah Swt. selalu melihat makhluk-Nya, tiada sesuatu pun dari urusan mereka yang tersembunyi dari-Nya. Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan:

ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

*“Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS al-Mujaadilah:7)*

Imam Ahmad mengatakan bahwa ayat ini dimulai dengan menyebut pengetahuan Allah dan diakhiri pula dengan pengetahuan-Nya.<sup>4</sup>

## 2. Komponen Sistem Pengendalian Internal dalam Ekonomi Islam

Pembagian pengendalian dalam ajaran islam terbagi dalam dua hal:<sup>5</sup>

- a. Pengendalian (*control*) yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Pengendalian yang efektif adalah yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada sebuah hadits yang menyatakan, *“Bertakwalah anda*

<sup>4</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-mujadilah-ayat-7-11.html>

Diakses pada 6 Januari 2019, pukul 18.23 WIB

<sup>5</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 156.



*kepada Allah, dimana pun anda berada*". Takwa tidak mengenal tempat. Takwa bukan hanya sekedar di masjid, bukan sekedar diatas sajadah, namun juga ketika beraktifitas, ketika dikantor dan ketika melakukan berbagai aktivitas. Takwa semacam inilah yang mampu menjadi control yang paling efektif. Takwa seperti ini dapat tercapai jika para manajer bersama-sama dengan para karyawan, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara intensif. Intinya dalah bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan control yang sangat kuat yang berasal dari dalam diri.

- b. Sebuah pengendalian akan lebih efektif jika sistem pengendalian tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri yaitu seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada. Pengendalian dalam sistem islam memiliki beberapa landasan, diantaranya:<sup>6</sup>

- 1) *Tawa Shsubil Haqiqi*, saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik tanpa norma yang jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturanyang jelas. Sebagai contoh, disepakati bahwa semua pegawai masuk kantor pukul 08.00 WIB dan keluar kantor pukul 17.00.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 160.

2) *Tawa Shaubil Shabri*, saling menasehati atas dasar kesabaran, dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang pada umumnya, seorang manusia sering mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu diperlukan *tawa shaubil shabri* atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan pun harus berulang-ulang. Member koreksi itu pun tidak cukup sekali. Maka disinilah pentingnya kesabaran.

3) *Tawa Shaubil Marhamah*, saling menasehati atas dasar kasih sayang, yaitu pengendalian dengan pendekatan secara personal dimana kita dituntut untuk sabar, cara menyampaikannya harus baik, dan tidak putus asa dengan tujuan untuk mencegah (perventif).

Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana seorang muslim melakukan pengendalian (manajemen) dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sekedar sebagai factor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Nabi Muhammad SAW mengelola (*manage*) atau mempertahankan (*maintain*) kerja sama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan *reward* (penghargaan) atas kreatifitas dan prestasi yang ditunjukkan

stafnya . manajemen islam pun tak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi).<sup>7</sup>

### 3. Pilar Etika Manajemen Bisnis Islam

Terdapat beberapa perbedaan pilar etika manajemen bisnis Islam, yaitu:

#### a. Prinsip Kesatuan/Keesaan

Kesatuan/keesaan merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan tuhan, dan dalam rangka melaksanakan titah tuhan.

#### b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

#### c. Prinsip Kebenaran,

Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam Al-Quran aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melakukan bisnis. Dalam konteks etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses hingga hasil dari keuntungan bisnis yang diperoleh.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 161.

d. Prinsip Kehendak Bebas/Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam manajemen bisnis Islam mutlak untuk dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya sehingga akan terjaminnya keutuhan dalam masyarakat yang *pluralistic*, dan harus sesuai dengan prinsip Islam yaitu melaksanakan yang benar dan menghapus ataupun menghindari yang salah.

e. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia.<sup>8</sup>

#### 4. Norma-Norma Etika dalam Berusaha dan Bekerja

Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman yang bersifat universal, menggariskan norma-norma etika dalam berusaha dan bekerja sebagai berikut:

- a. Kerja, aktivitas, amal sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
- b. Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT, sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai seperangkat kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah,

---

<sup>8</sup> Mad Nasir, Khoiruddin, OP.Cit. h. 55-66.

sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tidak sampai malalaikan ibadah kepada Allah.

- c. Suka sama suka antara pihak yang bersangkutan, etika suka sama suka ini merupakan satu isyarat bahwa pentingnya hubungan yang harmonis antara pedagang dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara buruh dan majikan, dan antara bawahan dengan atasan karena kedua belah pihak itu saling membutuhkan (independensi). Dalam etika suka sama suka juga tersirat adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam arti yang luas. Secara sederhana, hak-hak pekerja harus dapat perlindungan, kompetisi dalam setiap kehidupan dan profesi memang diakui dalam islam, tetapi harus dengan cara yang sehat (*fair*), yang intinya tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain.
- d. Dilandasi ahlak dan mental yang baik, setiap aktivitas atau pekerjaan yang islami harus dilandasi oleh ahlak yang mulia, karena itu pekerja atau pegawai, pedagang ataupun pekerja lainnya harus mempunyai ahlak dan sikap mental yang baik.
- e. Menerapkan administrasi yang baik dan manajemen yang tepat, administrasi yang baik dan manajemen yang tepat sangat menentukan keberhasilan seseorang ataupun kelompok, terutama dalam dunia modern seperti saat ini. Kedua-duanya betul-betul sangat menentukan kredibilitaas seorang pekerja, organisasi ataupun lembaga.



- f. Objek pekerjaan/usaha yang halal, halal disini dari segi agama, artinya tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama, selain itu dilarang pula mengusahakan sesuatu yang lebih banyak mendatangkan mudharat, melainkan harus usaha atau pekerjaan yang mendatangkan banyak manfaat bagi dirinya dan masyarakat banyak.<sup>9</sup>

## B. Sistem Pengendalian Internal

### 1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*.<sup>10</sup> COSO merupakan inisiatif gabungan yang terdiri dari *American Accounting Association, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), THE Institute of Internal Auditors, the Institute of Management Accountants, dan Financial Executives Institute*.

Tahun 1992, COSO menerbitkan *Internal Control-Integrated Framework (ICIF)* yang saat ini sudah banyak diterima diberbagai negara sebagai panduan kerangka pengendalian internal dan telah diterapkan ke dalam kebijakan, peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis.<sup>11</sup> Pada 2013, kerangka IC diperbaharui untuk kesempatan yang lebih baik lagi dengan proses bisnis dan penguasaan teknologi terkini. Kerangka IC baru tetap menggunakan lima

<sup>9</sup> Ibid, h. 135-139.

<sup>10</sup> Hery, *Auditing* (Yogyakarta: CAPS, 2013), h 90.

<sup>11</sup> Akuntansi Indonesia), *Modul Chartered Accountant Sistem Informasi dan Pengendalian Internal* (Jakarta: IAI, 2015), h. 41-42.

komponen dari kerangka asli dan menambahkan 17 prinsip yang membangun serta mendukung konsep.<sup>12</sup>

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan atas tercapainya tujuan pengendalian tersebut meliputi:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi.
- b. Reliabilitas pelaporan keuangan.
- c. Kesesuaian aturan dan regulasi yang ada.

Menurut COSO, sistem pengendalian internal memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian internal merupakan proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja.
- b. Sangat dipengaruhi dari berbagai tingkatan manajemen di dalam perusahaan.
- c. Hanya dapat memberikan perlindungan secara *reasonable* (sewajarnya), karena harus memperhatikan keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*)
- d. Ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya terhadap laporan keuangan saja.
- e. Memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda fungsinya namun saling terkait.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat. 2016), h. 230-231.

## 2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tugas tujuan namun dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan pada hukum dan peraturan,<sup>14</sup> yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Operasional

Pengendalian internal untuk mencapai tujuan operasional dilakukan agar sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien.

### b. Pelaporan keuangan

Pengendalian internal pada pelaporan keuangan dilakukan agar laporan yang dihasilkan dapat diandalkan.

### c. Kepatuhan

Pengendalian internal dengan tujuan kepatuhan dilakukan agar dapat menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup>

## 3. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu:

---

<sup>13</sup> Wing Wahyu Winarto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 11.5.

<sup>14</sup> Hery, *Op.Cit.* h. 87.

<sup>15</sup> IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), *Op.Cit.* h. 99-100.

- a. Lingkungan pengendalian.
- b. Aktivitas pengendalian.
- c. Penaksiran rasio.
- d. Informasi dan komunikasi.
- e. Pengawasan.

Prinsip pengendalian internal dari kelima komponen di atas adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian, adalah serangkaian proses dan standar yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian ke seluruh organisasi. Diharapkan lingkungan pengendalian dapat menimbulkan dampak yang luas untuk keseluruhan sistem pengendalian. Berikut 5 (lima) prinsip pada lingkungan pengendalian yang dapat diterapkan agar dapat terwujud dengan baik dalam pelaksanaan pengendalian yaitu:

- 1) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan kode etik
- 2) Direksi menunjukkan kemandirian dari manajemen dan mempertajam pengawasan untuk pengendalian internal, baik perkembangan maupun performa.
- 3) Manajemen menetapkan struktur, aturan pelaporan dan otoritas yang sesuai untuk mengejar tujuan, akan tetapi tetap berada di bawah pengawasan dewan direksi.

- 4) Organisasi menunjukkan komitmen untuk merekrut, mengembangkan, dan menjaga individu yang kompeten dalam pencapaian tujuan.
  - 5) Organisasi menjaga akuntabilitas setiap individu dalam tanggung jawab terhadap pengendalian untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup>
- b. Aktivitas pengendalian, adalah tindakan yang dilakukan melalui ketentuan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen terkait mitigasi risiko dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian dilakukan pada seluruh tingkat entitas dalam berbagai tahap dalam proses bisnis dan melalui lingkungan teknologi. Berikut adalah 3 (tiga) prinsip dalam aktivitas pengendalian agar dapat terwujud dengan baik yaitu:
- 1) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses mitigasi risiko yang mungkin terjadi selama pencapaian tujuan hingga mencapai tingkatan yang diinginkan.
  - 2) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian terhadap teknologi yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan
  - 3) Organisasi menerapkan aktivitas melalui kebijakan dan yang mewujudkan apa yang diharapkan dan juga prosedur yang dapat menjalankan kebijakan tersebut.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 100-101.



c. Penaksiran risiko, setiap entitas menghadapi berbagai macam risiko yang bersumber dari dalam maupun dari luar organisasi. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang memiliki efek terhadap ketercapaian tujuan. Penaksiran risiko melibatkan proses yang berulang dan juga dinamis. Penaksiran risiko juga menjadi dasar pertimbangan bagaimana risiko akan ditangani. 4 (empat) prinsip dalam penaksiran risiko agar dapat terwujud dengan baik dalam pelaksanaan pengendalian, yaitu:

- 1) Organisasi menjelaskan tujuan dengan cukup jelas agar dapat dilakukan penentuan serta penaksiran risiko yang berhubungan dengan tujuan tersebut.
- 2) Organisasi menentukan risiko yang mungkin terjadi dalam proses pencapaian suatu tujuan terhadap entitas terkait dan melakukan analisis sebagai dasar penentuan langkah yang akan diambil untuk menangani risiko tersebut.
- 3) Organisasi mempertimbangkan potensi terjadinya *fraud* dalam menaksir suatu risiko yang mungkin terjadi dalam proses pencapaian tujuan.
- 4) Organisasi menentukan dan menilai perubahan yang mungkin diambil untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

d. Informasi dan komunikasi, informasi diperlukan oleh entitas untuk menjalankan tanggung jawab pengendalian agar dapat menunjang

pencapaian tujuan. Manajemen menerima dan menghasilkan informasi yang berkaitan dan berkualitas dari sumber luar ataupun dari dalam untuk menunjang fungsi pengendalian internal. Komunikasi adalah proses penyediaan, pembagian, dan pemenuhan informasi yang dibutuhkan yang bersifat kontinyu serta berulang. Komunikasi internal berarti informasi disebarkan dalam lingkungan organisasi apabila diterapkan maka dapat terwujud dengan baik dalam pelaksanaan pengendalian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Organisasi mendapatkan atau menghasilkan serta menggunakan informasi yang berkaitan dan berkualitas untuk mendukung fungsi dari pengendalian internal.
  - 2) Organisasi berkomunikasi secara internal untuk berbagi informasi yang berguna untuk mendukung pengendalian internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian.
  - 3) Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar mengenai masalah yang memengaruhi pengendalian internal.
- e. Pengawasan atau evaluasi, evaluasi berjalan, evaluasi terpisah, ataupun kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan setiap komponen dalam pengendalian internal berjalan dengan baik. Evaluasi berjalan dibangun dalam tingkat entitas yang berbeda-beda terhadap proses bisnis, menyediakan informasi seiring waktu berjalan. Evaluasi terpisah, dijalankan secara berkala, akan memiliki variasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, keefektifan evaluasi berjalan,

dan berbagai pertimbangan manajemen lainnya. Pada pengawasan atau evaluasi terdapat 2 (prinsip) yang apabila diterapkan dalam pelaksanaan pengendalian internal dapat terwujud dengan baik, yaitu:

- 1) Organisasi memilih, mengembangkan dan menjalankan evaluasi berjalan dan/atau evaluasi terpisah untuk menjamin semua komponen pengendalian internal berjalan dengan baik serta sesuai kebutuhan atau tidak.
- 2) Organisasi mengevaluasi dan membahas defisiensi pengendalian internal secara berkala kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, termasuk manajemen senior dan dewan direksi.<sup>17</sup>

#### **4. Fungsi Penting Pengendalian Internal**

Pengendalian internal menjalankan fungsi penting:

- a. Pengendalian preventif untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Misalnya mempekerjakan personil yang memiliki keahlian, membagi wewenang karyawan, dan mengendalikan akses fisik atas asset dan informasi
- b. Pengendalian detektif untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Misalnya pengecekan ulang atas perhitungan dan penyusunan rekonsiliasi dan neraca saldo bulanan.
- c. Pengendalian korektif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.101-102.

terjadi. Misalnya mengarsip salinan dokumen, mengoreksi input data yang salah, dan memasukkan ulang transaksi untuk pemrosesan berikutnya.

Pengendalian internal dibedakan dalam dua kategori:

- a. Pengendalian umum untuk memastikan lingkungan pengendalian dari suatu organisasi dan dikelola dengan baik.
- b. Pengendalian aplikasi untuk memastikan transaksi telah diproses dengan benar. Pengendalian aplikasi menekankan pada akurasi, kelengkapan, validasi dan otentitas data yang diperoleh, dimasukkan, diproses, disimpan, dipindahkan ke sistem lain, serta dilaporkan.<sup>18</sup>

Alasan pentingnya pengendalian internal bagi manajemen dan auditor adalah:

- a. Luas lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin besar dan kompleks.
- b. Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidak beresan yang terjadi.
- c. Pengendalian internal yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya audit.
- d. Digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan dalam organisasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>19</sup> Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu, *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*, cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 223.

## C. Lembaga Pembiayaan Syariah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah kepada nasabah.<sup>20</sup> Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>21</sup>

Pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga pembiayaan syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>22</sup>

Secara umum pembiayaan syariah adalah sama seperti halnya konvensional, yaitu perusahaan pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit.<sup>23</sup> Pembiayaan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 304.

<sup>21</sup> M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 160.

<sup>23</sup> Ade Arthaesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta, PT Indeks, 2006), h. 247.

untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil atau dengan akad-akad syariah lainnya seperti, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijaroh*, *salam*, *istisna* dan *murabahah*.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan yang tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan, yaitu suatu keyakinan *shahibul maal* bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- c. Adanya kesepakatan, yaitu antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.

---

<sup>24</sup> Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 Tentang Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSNMUI/XI/2007.



- e. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- f. Adanya unsur waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu.
- g. Adanya risiko, yaitu jika adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih/macet pemberian pembiayaan.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergiurkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Op. Cit.* h. 87-88.

daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melaksanakan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha nya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan (*surplus*) sementara ada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.<sup>26</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan kedalam beberapa aspek diantaranya:

- a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
  - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
  - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>27</sup>
- b. Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuan dapat dibagi kedalam:
  - 1) Pembiayaan modal kerja (*working capita loan*), yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam

<sup>26</sup> Muhammad, *Op. Cit.* h. 17-18.

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 160.

rangka pengembangan usaha atau pemutaran modal (kredit jangka pendek).

2) Pembiayaan investasi (*investment loan*), yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan untuk memproduksi barang dan jasa utama yang diperlukan guna relokasi, ekspansi, modernisasi, usaha ataupun pendirian usaha baru (kredit jangka panjang).

3) Kredit konsumsi (*consumer loan*) adalah kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi pemakaian pribadi. Seperti rumah (KPR-kredit pemilikan rumah) dan lain-lain.<sup>28</sup>

c. Pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan menurut jangka waktu terdiri atas:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek (1 bulan-1 tahun)
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah (1-5 tahun)
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang (lebih dari 5 tahun).<sup>29</sup>

## 5. Pengertian Pembiayaan Konsumen Syariah

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Op. Cit.* h.21.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 22.

lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Menurut Bapepam-LK pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang telah diketahui secara umum, kebutuhan konsumsi terdiri dari kebutuhan primer (makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer.<sup>30</sup>

Konsumsi dalam ekonomi islam dapat didefinisikan dengan mengonsumsi sesuatu yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Preferensi konsumen dalam islam dibangun berdasarkan kebutuhan akan kemaslahatan, baik maslahat yang diterima di dunia maupun di akhirat. Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia kepada derajat yang lebih tinggi sebagai mahluk yang sempurna. Maslahat dunia dapat berbentuk fisij, biologis, psikis, dan material. Sedangkan maslahat

---

<sup>30</sup> Andrian Soemitra, *Op.Cit.* h. 365-366.

akhirat berupa pahala yang akan diberikan di akhirat sebagai akibat perbuatan mengikuti ajaran islam.<sup>31</sup>

## 6. Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen

Beberapa jenis produk pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pemilikan rumah (KPR), yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah/tempat tinggal.
- b. Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor seperti mobil roda empat atau motor dengan produksi umumnya di bawah lima tahun. Pembiayaan untuk kendaraan bermotor umumnya menggunakan akad mudharabah.
- c. Pembiayaan tanpa agunan, merupakan pembiayaan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah pembiayaan untuk membayar angsuran setiap bulan atau dilakukan dengan perlindungan asuransi berbasis syariah. Di Indonesia, produk pembiayaan tanpa agunan belum berkembang dengan baik karena selain produk tersebut memiliki risiko yang relative tinggi, juga tidak ada fatwa dan peraturan OJK yang mengaturnya.
- d. Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan perorangan/individu yang memiliki pendapatan/penghasilan tetap maupun tidak tetap untuk berbagai keperluan atau keperluan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 366.



konsumtif dengan agunan/jaminan berupa rumah tinggal/apartemen/ruko yang dimiliki berdasarkan prinsip syariah.

- e. Pembiayaan kartu syariah merupakan kartu plastic yang dikeluarkan oleh bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Sesuai fatwa Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *syariah card*, produk ini menggunakan *akad qard*, *ijarah*, dan *kafalah*<sup>32</sup>.

## 7. Prinsip Operasional Pembiayaan Konsumen Syariah

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang diterapkan oleh syariah. Pada prinsipnya pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.

---

<sup>32</sup> Ikatan Bankir Indonesia. *Op Cit.* hlm. 50-51.

## 8. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen dengan Akad *Mudharabah*

Ketentuan pembiayaan mudharabah meliputi:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### Rukun dan Syarat Pembiayaan :

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad): Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak: Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; Modal

dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

c. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dahrani, Mirhanifah, "Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan" (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnia, vol 14No. 1. Maret,2014), h. 9-10.

## 9. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Al-Muzzammil: 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ  
 تُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang

yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Muzzammil:20)

## 2) Al-Jumu“ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu“ah: 10).<sup>34</sup>

### b. Al-Hadist

#### 1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah, ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan terjemahannya*, h.990.

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, Maktabah Wa Mathba“ah Mushthafa Al-halabi, Mesir, 1960, h.76.



2) HR. Ibnu Majah

*“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mundharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>36</sup>

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>37</sup>

## 10. Prosedur Pembiayaan Konsumen Syariah

Secara umum prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut:

a. Pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif.

- 1) Perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati.
- 2) Penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen.
- 3) Konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Al-Kahlani, *As-Salam...*, h. 76.

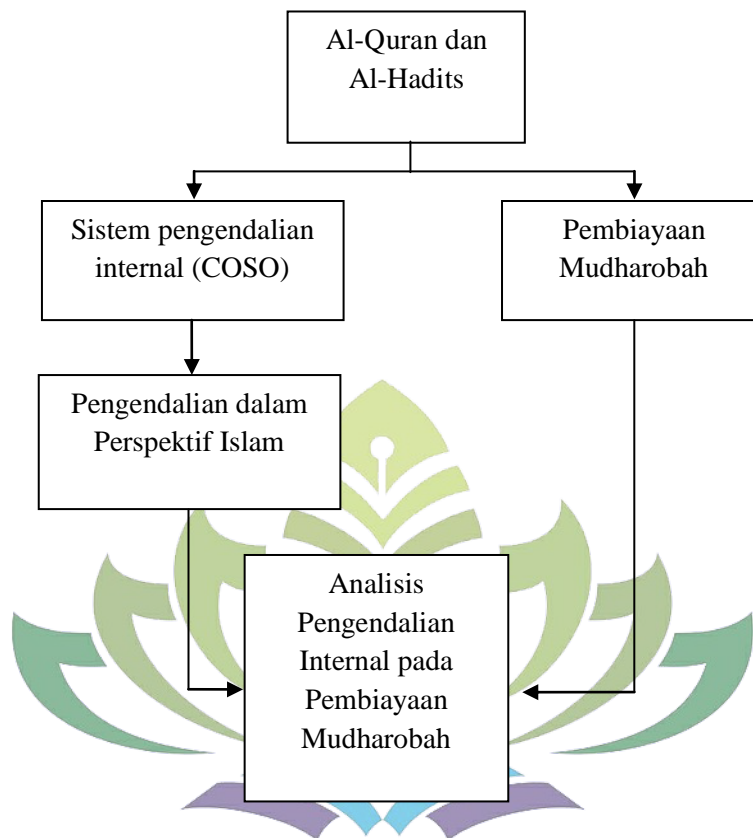
<sup>37</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...* h. 161.

<sup>38</sup> Sultan Remy Sjahdemi, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 377-378.

#### D. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pikir**



Kerangka berfikir tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Dana guna Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan Way Kandis Bandar Lampung) dengan menggunakan teori model pengendalian internal COSO IC terbaru yaitu COSO IC 2013, dimana COSO IC 2013 tidak merubah definisi dari COSO IC 1992, tetap terdiri dari 5 komponen hanya saja penjelasannya mengalami penyempurnaan. 5 komponen COSO yaitu, lingkungan pengendalian, aktifitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan

komponen, serta pengawasan COSO IC 2013 juga mengenalkan 17 prinsip pengendalian internal.

Serta dengan menggunakan teori pengendalian internal dalam pandangan islam yang terbagi menjadi 2 hal yaitu, pengendalian yang berasal dari diri sendiri dan pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri. Kemudian dianalisis diantara teori tersebut dengan permasalahan yang terdapatdi KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan yaitu mengenai Pemberian Dana guna Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam apakah telah diterapkan dan sesuai antara system pengendalian internaldi KSPPS BTM BiMU Cabang Ahmad Dahlan dengan teori dan *Standard Operating Procedure (SOP)*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 160.
- Arthaesa Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta, PT Indeks, 2006), h. 247.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.990.
- Hafiduddin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 156.
- Hery, *Auditing* (Yogyakarta: CAPS, 2013), h 90.
- Hery, *Auditing and Asurans Integrated and Comprehensiv Edition* (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), h. 133.
- IBI (Ikatan Bankir Indonesia), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 3.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Modul Chartered Accountant Sistem Informasi dan Pengendalian Internal* (Jakarta: IAI, 2015), h. 41-42.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet.11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 105-106.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan Pembiayaan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Madnasir, Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 95
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat. 2016), h. 230-231.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-halabi, Mesir,1960, h.76.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 304.

P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). H. 17.

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 Tentang Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSNMUI/XI/2007.

Rianto M. Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42.

Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, dan penelitian*(Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 265.

Sjahdemi Sultan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 377-378.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 333.

Suhayati Ely, Siti Kurnia Rahayu, *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*, cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 223.

Umar Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), h. 70.

Winarto Wing Wahyu, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 11.5.

Yaya Rizal dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontenporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 115.

### **Karya Ilmiah**

Setiawan, N.O.H., dan Wisadha, I.G.S., (2014). Analisis efektivitas Struktur pengendalian intern atas prosedur kredit pada BPR dikabupaten badung. *Jurnal Akuntansi universitas udayana*, (Vol. 6 No. 2 hal 306-318, ISSN 2302-8556).

Salim Faradila A., “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin manado”. (*Jurnal EMBA*, Vol. 3 No.1, Maret, 2015), h. 1034.

Rimbawa Dikdik, “Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit”. (*Skripsi Program Sarjana Ekonomi Ilmu Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung*, 2005), h. 4.

Nurhasanah Neneng, “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal MIMBAR*. (Vol. 29 No. 1, Juni, 2013), h. 13.

Muzammil Mohammad, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda (Studi Kasus Di Bri Kcp Unit Karang Paci Samarinda)”. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, (Vol. 3 No.3, 2015), h. 662.

Hanif, “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada PK-BLU Studi Kasus Di IAIN Raden Intan Lampung”. (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 11.

Hadi Pemi Rosalina dan Yulastuti Rahayu, “Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 3 No. 11, 2014), h. 1.

Dewi, N.M.S., dan Darsono. (2012). “Analisis penerapan struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang diberikan oleh bank syariah cabang semarang”. *Jurnal akuntansi Dipenegoro*, (Vol. 1. No. 1), hal. 1-15.

Dahrani, Mirhanifah, “Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Vol 14 No. 1. Maret, 2014), h. 9-10.

#### **Internet**

<http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-insyirah.html>.

<https://risalahmuslim.id/quran/at-taubah/9-105/>.